



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2020



Kegiatan Kementerian Pertanian RI
dengan
Dewan Perwakilan Rakyat /
Dewan Perwakilan Daerah RI

MS 1

Masa Persidangan

Tahun Sidang 2019 - 2020

KALAI DO SKOP



KATA PENGANTAR

KEPALA BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr., Ph.D

Assalamuallaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan-Nya. sehingga kami dapat menyusun Buku Kaleidoskop ini.

Kaleidoskop ini disusun untuk mendokumentasikan dan mensosialisasikan berbagai kegiatan yang dilakukan Kementerian Pertanian dengan MPR/DPR-RI khususnya Komisi IV DPR-RI dan Komite II DPD-RI selama Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 - 2020. Dokumentasi kegiatan itu berupa foto-foto pada saat RAKER, RDP, Rapat/Sidang Paripurna, FGD, Kunker Spesifik, Kunker masa Reses dan kegiatan lainnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Kaleidoskop ini, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Akhir kata, semoga kaleidoskop ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamuallaikum Wr. Wb

REDAKSI

SUB BAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Ade Nurtejo, SS
Redaktur dan Layout

Farah Inayati, SH
Anggota Redaksi

Lilli Fatima, S.Sos
Editor

Musmita, SE
Anggota Redaksi

Mujianto
Anggota Redaksi

RR. Saryati
Anggota Redaksi

Yuli Martono, S.Hum, MA
Anggota Redaksi



DAFTAR ISI

KALEIDOSKOP MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2019 - 2020

- i **KATA PENGANTAR**
- ii **REDAKSI**
- iii **DAFTAR ISI**

CHAPTER 1 : RAPAT KERJA / RAPAT DENGAR PENDAPAT / RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM

HALAMAN 1	RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN RI tanggal 5 NOVEMBER 2019
HALAMAN 4	RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN RI tanggal 18 NOVEMBER 2019
HALAMAN 7	RAPAT DENGAR PENDAPAT 11 NOVEMBER 2019
HALAMAN 10	RAPAT DENGAR PENDAPAT 25 NOVEMBER 2019
HALAMAN 16	RAPAT DENGAR PENDAPAT 12 DESEMBER 2019
HALAMAN 16	RAPAT DENGAR PENDAPAT 16 DESEMBER 2019

CHAPTER 2 : KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR RI BERSAMA KEMENTERIAN PERTANIAN RI

HALAMAN 20	KUNJUNGAN KERJA KE PROVINSI ACEH tanggal 18 - 20 DESEMBER 2019
HALAMAN 24	KUNJUNGAN KERJA KE PROVINSI SULAWESI SELATAN tanggal 18 - 20 DESEMBER 2019
HALAMAN 28	KUNJUNGAN KERJA KE PROVINSI JAWA TIMUR tanggal 18 - 20 DESEMBER 2019

CHAPTER 3 : KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI BERSAMA KEMENTERIAN PERTANIAN RI

HALAMAN 33	KUNJUNGAN KERJA KE PROVINSI JAMBI tanggal 7 NOVEMBER 2019
------------	---

CHAPTER 4 : KUNJUNGAN KERJA MENTERI PERTANIAN BERSAMA MPR / DPR / DPD RI

HALAMAN 36	KUNJUNGAN KERJA KE PROVINSI JAWA TENGAH tanggal 19 NOVEMBER 2019
HALAMAN 38	KUNJUNGAN KERJA KE PROVINSI JAWA BARAT tanggal 16 DESEMBER 2019
HALAMAN 40	KUNJUNGAN KERJA KE PROVINSI SUMATERA SELATAN tanggal 23 DESEMBER 2019

CHAPTER 1

**RAPAT KERJA / RAPAT DENGAR PENDAPAT
DPR / DPD / MPR RI**

RAPAT KERJA

KOMISI IV DPR RI DENGAN MENTERI PERTANIAN RI, TANGGAL 5 NOVEMBER 2019





Komisi IV DPR-RI sedang melakukan Raker dengan Menteri Pertanian di R.R Komisi IV DPR RI, Jakarta

Komisi IV DPR RI menyoroti banyak aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan program kerja Menteri Pertanian yang baru, Syahrul Yasin Limpo. Salah satu yang diperjuangkan adalah meningkatkan kesejahteraan para buruh tani. Karena dari merekalah, ketahanan pangan Indonesia dapat terbangun. Saat ini kesejahteraan buruh tani masih jauh dari layak. Petani kerap dipandang sebelah mata di masyarakat, padahal mereka punya peran yang sangat signifikan. Komisi IV DPR RI berharap agar pemerintah melindungi buruh tani, berikan jaminan kesehatan yang memadai, rumah dan pendidikan tinggi yang baik, karena petani berperan besar dalam swasembada pangan.

Oleh karena itu, ketika berbicara pertanian, seharusnya bicara lintas sektor dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Komisi IV DPR RI cukup prihatin tidak adanya data yang sinkron tentang jumlah dan keberadaan buruh tani. Bahkan mengaku sulit untuk mendapatkan data di kepala desa atau kelurahan. Sehingga, hal pertama yang harus dibangun dalam peningkatan kesejahteraan buruh tani adalah membangun database dan sinergi yang baik lintas lembaga. Terlebih saat ini, buruh tani juga terancam keberadaannya karena semakin maraknya pihak-pihak yang ingin mengubah lahan pertanian menjadi lahan industri atau properti.



Komisi IV DPR RI juga menegaskan, kondisi seperti ini harus menjadi perhatian Menteri Pertanian yang baru. Dalam sektor hulu, harus ada perhatian. RT RW-nya pun harus dievaluasi karena hawa nafsu politik kerap mengubah area pertanian menjadi area industri dan properti. Usai menerima masukan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan akan menindaklanjutinya dalam rapat internal di Kementan. Sehingga diharapkan sinergi yang baik antara Komisi IV DPR RI dengan Kementan dapat terus dibangun guna menghasilkan output yang bermanfaat di masyarakat.





Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo

Mentan mengatakan dalam 100 kerja, memfokuskan dalam memperbaiki data pangan. Data merupakan pijakan utama agar benar-benar bekerja dengan tepat guna mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk menghasil data yang akurat, lanjut Syahrul, Kementan bersama BPS dan kementerian terkait dalam waktu dekat ini membangun sistem untuk melakukan pencitraan satelit dengan resonansi tinggi dengan menggunakan artificial intelligence dan menggunakan robot contraction. Sehingga, seperti apa pergerakan pertanian di daerah dan berfungsinya alsintan dapat dimonitor. Mentan berharap nanti Januari-Februari nanti sudah bisa melaporkan bahwa 267 juta rakyat Indonesia dapat sumber pangan dari mana dan tahu daerah mana yang masih bisa ditanam dan kapan akan terjadi panen.

RAPAT KERJA

KOMISI IV DPR RI DENGAN MENTERI PERTANIAN RI, TANGGAL 18 NOVEMBER 2019





Sudin (Ketua Komisi IV DPR-RI/ Fraksi PDIP)

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanian dan pelaksanaan kebijakan cetakan sawah, subsidi pupuk, importasi bawang putih, pengembangan komoditas perkebunan, tata kelola dan pengembangan peternakan, dan kebijakan integrasi sapi-sawit. Lebih pokok, Kementan didesak untuk menyiapkan peta jalan atau roadmap kebijakan pengembangan seluruh sub-sektor pertanian. Termasuk melakukan verifikasi seluruh data pertanian dalam rangka pembangunan pertanian yang maju, mandiri dan modern. Untuk itu, Komisi IV DPR RI telah memberikan dukungan anggaran untuk tahun mendatang. Ketua menambahkan, Komisi IV DPR RI menerima usulan atas perubahan komposisi pagu anggaran tahun 2020 lingkup Kementan.



Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan benih dalam rangka mendorong pemberlakuan kembali kebijakan subsidi benih guna pemenuhan ketersediaan benih unggul. Begitu juga dengan kesejahteraan penyuluh pertanian yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian. Seluruh Eselon 1 di Kementan pun juga diminta melakukan pengembangan sentra atau zonasi komoditas pertanian unggulan di setiap provinsi untuk mencapai kemandirian pangan dan pertanian serta peningkatan komoditas ekspor.





Komisi IV DPR RI juga dapat menerima penjelasan atas usulan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun anggaran 2020 sebanyak 7,9 juta ton dengan rincian Urea sebanyak 3,2 juta ton, SP-36 sebanyak 500 ribu ton, ZA sebanyak 750 ribu ton, NPK sebanyak 2,7 juta ton, pupuk organik atau kompos dengan kualitas tertentu setara dengan Rp 1,1 triliun.

RAPAT DENGAR PENDAPAT

KOMISI IV DPR RI DENGAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI,
TANGGAL 11 NOVEMBER 2019





Komisi IV DPR RI menyoroti banyak aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan program kerja seluruh mitra kerjanya di pemerintahan, termasuk Kementerian Pertanian. Kementan dirasa harus memperhatikan bagaimana memperdayakan petani, agar kehidupannya bisa sejahtera. Pemberdayaan petani juga perlu dilakukan agar para milenial bisa tertarik menjadi petani. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah baik pusat dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Seperti memberikan peralatan pertanian, bibit dan pupuk. Namun jumlah yang diberikan tersebut masih sangat terbatas. Selain itu jumlah tenaga penyuluh pertanian juga masih belum ideal. Sehingga nasib petani masih saja tetap terpinggirkan. Satu tenaga penyuluh cakupan wilayahnya juga satu kecamatan. Idealnya satu tenaga penyuluh itu untuk tiga desa dengan cara meningkatkan jumlah penyuluh memang membutuhkan anggaran yang lebih.





Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI akan mendukung penambahan anggaran untuk memperdayakan petani yang diminta Kementan. Sehingga dengan penambahan anggaran tersebut maka ke depan banyak pihak yang tertarik untuk menjadi petani. Masalah pertanian dari tahun-ke tahun memang menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk diselesaikan. Karena hingga kini belum ada penyelesaian menyeluruh pada persoalan mendasar pertanian. Apalagi, masalah pertanian terjadi dari sektor hulu hingga hilir. Seperti masalah alih fungsi lahan pertanian dan komponen dasar produksi pertanian semakin sulit. Permasalahan yang dihadapi petani juga terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi. Karena blokir atau penghentian pupuk bersubsidi di beberapa wilayah Indonesia merupakan salah satu pemicu kisruhnya pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi secara nasional.



M. Ichsan Firdhaus (Anggota/Fraksi Partai Golkar)

Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus mengatakan, keberadaan mafia pangan harus diberantas secara tuntas. Karenanya ia memberikan dukungan kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk bersikap tegas dalam memberantas mafia pangan.

RAPAT DENGAR PENDAPAT

KOMISI IV DPR RI DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN
PERTANIAN RI, TANGGAL 25 NOVEMBER 2019





G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI/ Fraksi Gerindra)

Diskriminasi industri kelapa sawit Indonesia terus terjadi di Uni Eropa, melawan kampanye hitam terhadap industri kelapa sawit saat ini menjadi kepentingan nasional. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono menyampaikan, industri kelapa sawit di Indonesia menyangkut hajat hidup rakyat banyak, oleh sebab itu dia mendukung peran diplomasi parlemen untuk memerangi isu-isu negatif terhadap sawit. Tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit adalah tantangan kita bersama, karena ini menyangkut 4,3 juta tenaga kerja langsung. Beliau sepakat mengenai diplomasi atau peran parlemen dalam memerangi isu-isu negatif yang selalu terjadi pada industri kelapa sawit. RDP ini juga dihadiri juga oleh Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, dan Ketua Umum Asosiasi Plasma PIR Indonesia.



Dirjen Perkebunan, Kasdi Subagyo memaparkan delapan tantangan industri sawit untuk memajukan sektor ini; pertama, mengenai rendahnya produktivitas minyak sawit yang baru di kisaran 3,6 ton/ha/tahun sedangkan potensi sebesar 5-6 ton/ha/tahun. Kedua, kebutuhan harmonisasi satu data dan pemetaan. Ketiga, terdapat indikasi kurang lebih kebun sawit sekitar 3 juta hektar berada di dalam kawasan hutan/KHG. Keempat adalah persoalan legalitas dan perizinan, karena ada disharmonisasi peraturan atau Kementerian dan lembaga terkait baik di pusat maupun daerah. Kelima, gangguan dan konflik usaha antara perusahaan besar swasta/negeri dengan perkebunan rakyat. Keenam yaitu kerusakan lingkungan dan kebakaran. Ketujuh, masalah kampanye negatif yang dilakukan Uni Eropa. Tantangan terakhir upaya hilirisasi produk turunan sawit.



DIREKTUR JENDERAL
PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI

KETUA LINGKUNGAN
GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA
SABIT INDONESIA



Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.PA. (Anggota Komisi IV DPR-RI/ Fraksi PKB)

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nurhamidah menyampaikan, kampanye hitam kelapa sawit sudah pada taraf kegiatan intelijen ekonomi. Kegiatan intelejen ekonomi yang sudah bekerja, jutaan dolar diinventasikan untuk memframing cara pikir media dan perusahaan. Mereka membayar hanya untuk membuat desain yang seperti itu. Dalam rapat yang membahas prospek pengembangan usaha kelapa sawit dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha, dia mempertanyakan apakah pemerintah sadar dan melakukan hal yang sama untuk menangkal kampanye hitam tersebut, karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak dan juga terkait dengan nilai ekonomi yang besar. Dia juga mengungkapkan, di Uni Eropa, pusat-pusat riset dibiayai hanya untuk membuat kesimpulan bahwa sawit itu berbahaya untuk kesehatan.

RAPAT DENGAR PENDAPAT

KOMISI IV DPR RI DENGAN DIREKTUR JENDERAL PSP, KEPALA BADAN PPSDMP,
KEPALA BADAN LITBANG PERTANIAN , TANGGAL 12 DESEMBER 2019





Sudin (Ketua Komisi IV DPR-RI/ Fraksi PDIP)

Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama bersama Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian, Badan Litbang Pertanian, serta PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) guna membahas kendala distribusi pupuk bersubsidi. Ketua Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa besarnya jumlah subsidi yang diberikan pemerintah belum efektif dalam pelaksanaan pupuk bersubsidi untuk petani, masih menimbulkan banyak permasalahan, antara lain petani kesulitan mengakses pupuk bersubsidi, kelangkaan pupuk yang disebabkan karena kurang validnya data. Ia menjelaskan bahwa data luas lahan baku sawah Nasional yang belum valid menjadi salah satu faktor belum efektifnya pelaksanaan distribusi pupuk. Padahal, data lahan baku sawah menjadi rujukan kebijakan pemerintah terkait volume dan sebaran distribusi pupuk.





Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Sarwo Edhy menargetkan pelaksanaan Kartu Tani dalam penyaluran distribusi dana untuk subsidi pupuk efektif berjalan pada 2020 di sejumlah provinsi. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR, Sarwo Edhy menyebutkan bahwa sosialisasi penggunaan Kartu Tani telah dilakukan sejak 2018 di wilayah Bali, Jawa dan Nusa Tenggara. Sisa wilayah lainnya disosialisasikan di tahun 2019. Sebetulnya untuk sosialisasi seluruh wilayah Indonesia sudah selesai dan pemerintah mengharapkan di tahun 2020 bisa efektif dilaksanakan.

Ada pun Kartu Tani merupakan kartu yang dikeluarkan oleh perbankan, dalam hal ini tiga bank Himbara, untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin EDC di kios pengecer resmi. Sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), jumlah petani yang menerima subsidi pupuk tercatat sebanyak 10,78 juta orang dengan rencana luas tanam 20,38 juta ha. Secara rinci, jumlah subsidi pupuk yang diberikan untuk jenis Urea sebanyak 544 juta ton dan jenis NPK 6,43 juta ton. Dari total jurniah penerima tersebut, Kartu Tani yang diterbitkan oleh tiga Bank Himbara, yakni BNI, BRI dan Mandiri, sebanyak 5,6 juta kartu.





Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR-RI dengan Direktur Jenderal PSP, Kepala Badan Litbang, Kepala Badan PPSDMP, Jakarta, 12 Desember 2019

Komisi IV DPR RI menyebutkan permasalahan lainnya soal distribusi pupuk, yakni penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk, penimbunan penjualan pupuk di luar wilayah distribusi, serta kurang efektifnya pengawasan pupuk pestisida. Dirjen PSP berharap agar PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebagai penyedia pupuk dapat menekan para distributor untuk segera menjalankan program Kartu Tani, sehingga penebusan pupuk akan lebih cepat terealisasi dan tepat sasaran. Sebelumnya, diketahui besaran anggaran subsidi pupuk yang telah disepakati oleh Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI untuk 2020 berada di angka Rp26,62 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan pupuk dengan volume 7,94 juta ton.

Pemerintah juga berupaya memperketat jalur distribusi pupuk subsidi dengan program Kartu Tani. Kartu Tani mengintegrasikan data pelaksanaan pupuk subsidi secara "online" dan "real time". Terhitung sampai 30 November 2019, kartu tani baru digunakan 571.396 petani atau baru sekitar 10 persennya. Beberapa kendala di antaranya seperti petani lupa kode pinnya, kartunya terselip, kemudian yang paling banyak kendala adalah kekuatan sinyal, tetapi Ditjen PSP sudah berkomunikasi dengan Kominfo untuk dilakukan penguatan sinyal.

RAPAT DENGAR PENDAPAT

KOMISI IV DPR RI DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PETTANIAN RI , TANGGAL 16 DESEMBER 2019





Hasan Aminudin (Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI/ Fraksi Nasdem)

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminudin mengungkapkan perlunya penyelesaian permasalahan data luasan perkebunan sawit di Indonesia. Hal ini penting agar peremajaan sawit dan optimalisasi hasil sawit bisa cepat dilakukan. Hal itu diungkapkan usai RDP dengan Dirjen Perkebunan Kementan dan Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam membahas prospek peremajaan sawit di Indonesia. Komisi IV meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan data luasan perkebunan kelapa sawit dan data produksi minyak kelapa sawit agar program peremajaan sawit rakyat dapat segera dipercepat dan dana yang berasal dari BPDPKS harus dilakukan tepat sasaran tepat waktu tepat guna dan diprioritaskan untuk peremajaan sawit rakyat.



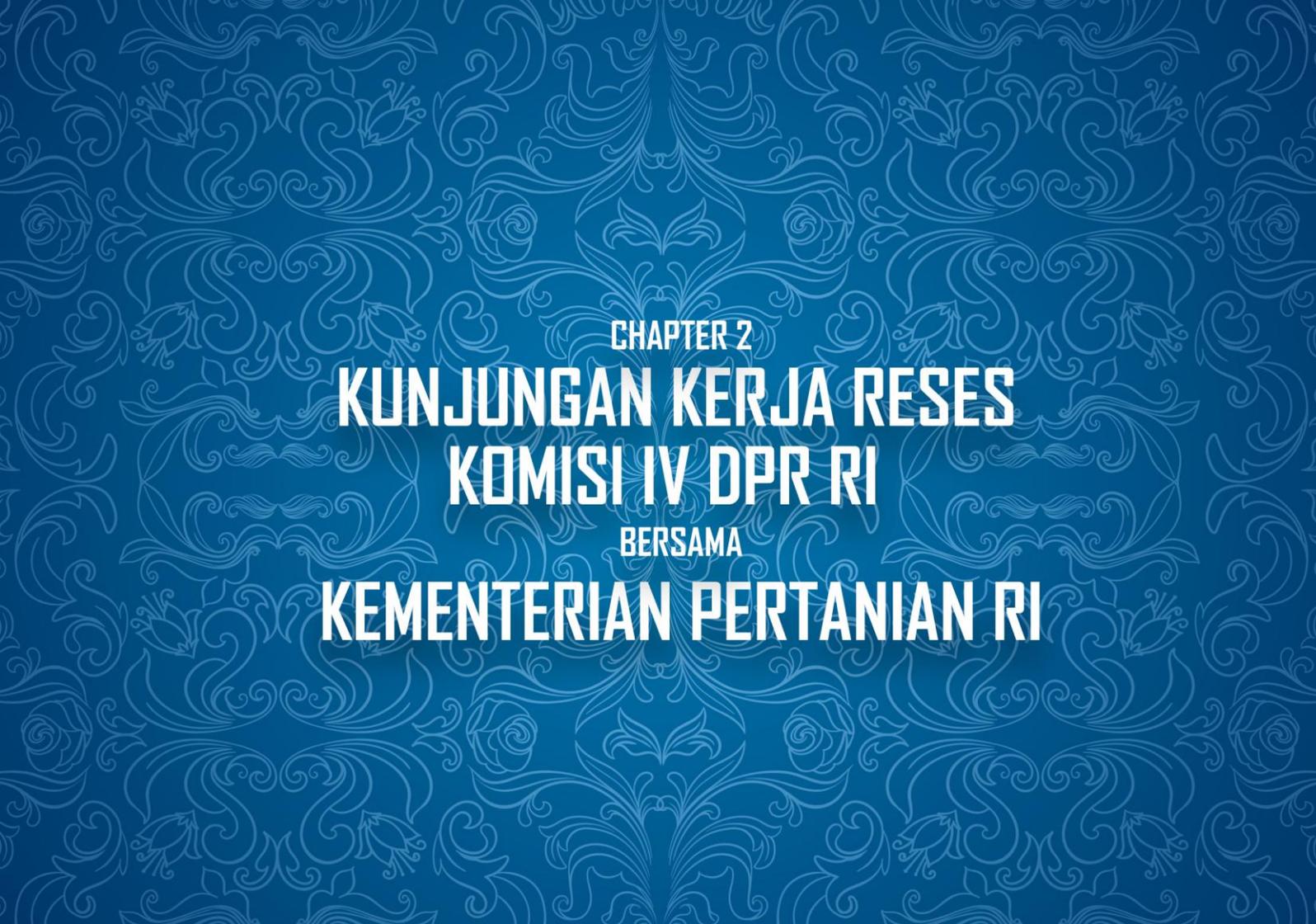


Selain itu untuk menjaga keberlangsungan sawit, Komisi IV DPR RI juga meminta Pemerintah untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas perkebunan yang menguntungkan bagi pelaku usaha perkebunan. “Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pemerintah berkewajiban melakukan upaya diplomasi untuk memperluas pasar kelapa sawit dunia,” jelasnya. BPDPKS juga diminta untuk menyerahkan data alokasi dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit yang telah dihimpun sejak lembaga ini dibentuk selambat-lambatnya 1 hari setelah rapat dengar pendapat yang digelar hari ini. Komisi IV DPR RI pun mendorong agar dana tersebut juga digunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).



Komisi IV juga meminta pemerintah melalui BDPDKS agar dana perkebunan kelapa sawit yang telah dihimpun digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan atau sarana dan prasarana perkebunan sesuai dengan pasal 93 ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Untuk membahas sawit secara lebih lanjut dan spesifik, dilaporkan bahwa Komisi IV DPR RI berencana untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Kelapa Sawit. Diharapkan dengan adanya Panja ini mampu menyelesaikan persoalan sawit dari hulu hingga hilir.





CHAPTER 2
KUNJUNGAN KERJA RESES
KOMISI IV DPR RI
BERSAMA
KEMENTERIAN PERTANIAN RI



Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI/ Fraksi Golkar)

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyarankan agar konsep pertanian dan peternakan diintegrasikan, sehingga kesejahteraan petani meningkat. Konsep integrasi dimaksud Dedi adalah petani harus diberi kegiatan produktif lainnya selain bersawah. Misalnya, para petani yang memiliki sawah di bawah 1 hektar, dibantu bibit sapi untuk dikembangkan, diintegrasikan, jerami menjadi pakan yang baik. PPL (Penyuluh Petani Lapangan) pertanian dan peternakan harus juga terintegrasi dan massif dalam melakukan penyuluhan di seluruh wilayah di Indonesia. Hal itu diungkapkan ketika memimpin tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke BPTU - HPT Indrapuri di Provinsi Aceh.



Ia menekankan petani di Aceh dan umumnya Indonesia harus memiliki usaha sampingan. Sehingga sambil menunggu panen, petani bisa melakukan kegiatan produktif demi meningkatkan kesejahteraan. Politisi Fraksi Partai Golkar ini akan mendorong agar petani di Indonesia diberi bantuan anak sapi untuk dibesarkan. Anak sapi tersebut dikeluarkan melalui BPTU-HPT Indrapuri sebagai lembaga yang menyediakan bibit ternak. Warga penerima bantuan harus diberi target seperti dalam setahun perkembangbiakkan sapi seperti apa, jadi petani akan punya nilai tambah. Selain buruh tani, dia memiliki sapi.



Kunjungan ke Pendopo Gubernur Aceh

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengajak semua anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk proaktif mempromosikan potensi investasi di Aceh. Ia mengatakan, Aceh sangat terbuka bagi dunia investasi. "Investasi adalah cara untuk mempercepat transformasi ekonomi," kata Nova saat menjamu makan malam rombongan komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Aceh, di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (18/12/2019). Nova mengatakan, hanya dengan investasi masalah yang ada di Aceh dapat diatasi. Investasi, kata dia, akan membuka lapangan pekerjaan dan tingkat kemiskinan akan diturunkan. Nova menuturkan, sejauh ini pihaknya juga telah membangun hubungan dengan sejumlah investor dari berbagai negara untuk menarik mereka berinvestasi di Aceh.





Plt Gubernur mengungkapkan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe merupakan salah satu potensi yang dimiliki Aceh yang bisa ditawarkan untuk berinvestasi. Selain karena infrastruktur yang sudah memadai, kawasan tersebut juga berada pada jalur perdagangan internasional. Dari sisi keamanan, kata Plt Gubernur, Aceh jauh lebih aman dibandingkan ibu kota negara. Menurutnya, sikap masyarakat luar yang mempersepsikan Aceh sebagai daerah yang rawan adalah salah.



Kunjungan ke Balai Penelitian Tanaman Serealia , Maros

Dalam kunjungan kerja kali ini, anggota komisi IV DPR RI melakukan peninjauan fasilitas riset jagung nasional serta tatap muka langsung dengan peneliti, pelisensi jagung hibrida, dinas pertanian, serta penyuluh yang terkait dengan pengembangan jagung dan sorgum nasional. Kepala Badan Litbang Pertanian Fadry Djufry menyampaikan kegiatan riset Balitbangtan untuk percepatan pelepasan varietas unggul baru serta capaian yang diperoleh dari pemanfaatan hasil riset di masyarakat. Pemaparan teknis kegiatan riset jagung dan sorgum disampaikan oleh Kepala Balitserealia Muhammad Azrai yang meliputi kegiatan pemuliaan dan perbenihan, kerja sama dengan Lembaga Litbang Internasional Cimmyt (International Maize and Wheat Improvement Center) untuk percepatan pelepasan varietas unggul baru serta hilirisasi hasil litbang jagung yang berbasis double track.

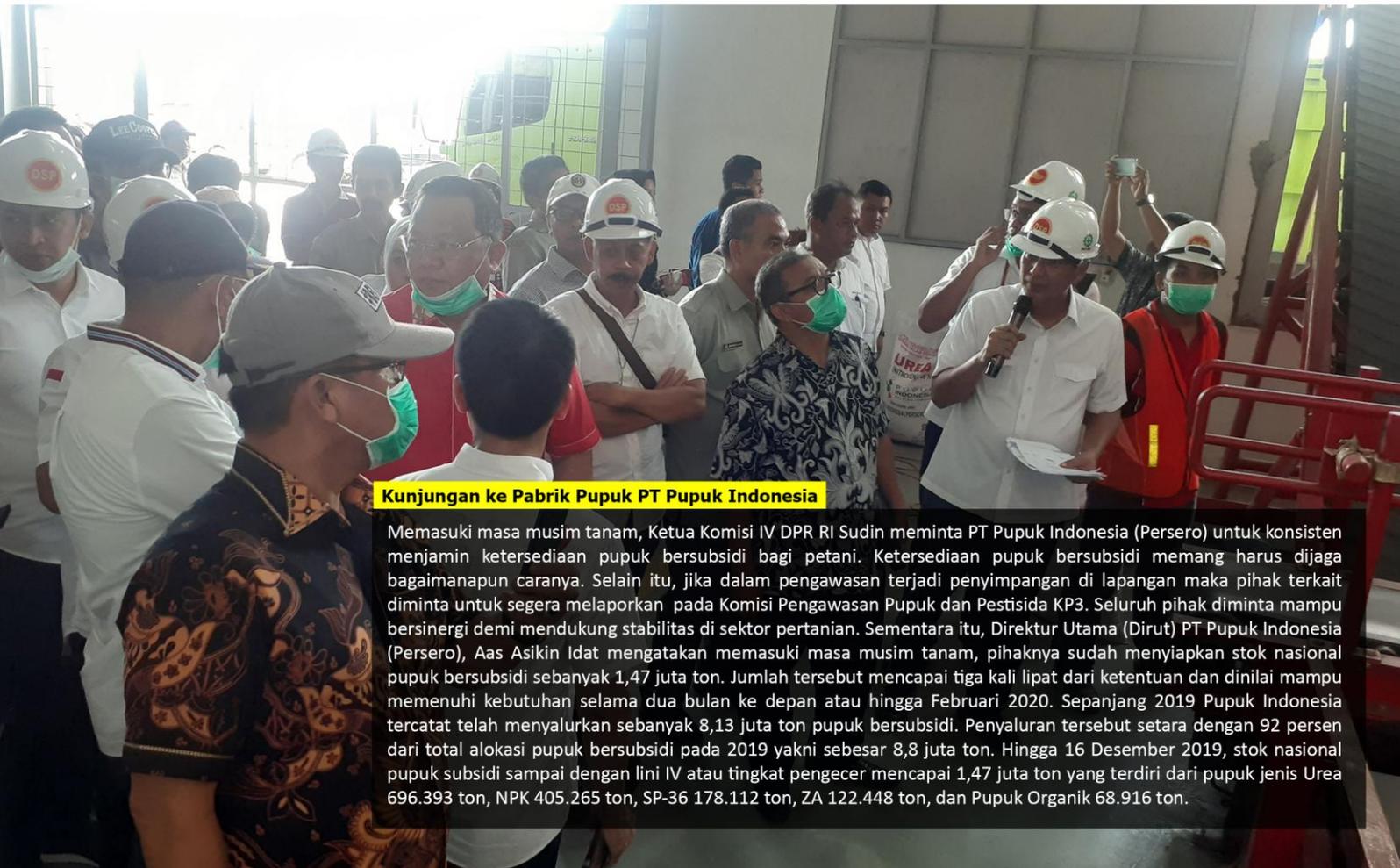
Ketua Komisi IV DPR-RI, Sudin dalam sesi dialog menyampaikan apresiasi atas capaian Balitbangtan dan UPT nya dalam mendukung program pemenuhan pangan nasional. Secara prinsip DPR dari lintas fraksi mendukung dalam hal konteks pembangunan negara tidak bisa berbeda, selama itu kepentingan merah putih harus didorong. Untuk menunjang hasil penelitian pertanian, tahun 2021 mendatang, anggaran untuk Kementerian Pertanian akan ditambah seiring dengan permintaan Presiden Joko Widodo yang menginginkan SDM dan budidaya pertanian yang harus ditingkatkan. Komisi IV DPR RI menyampaikan harapan agar Balitbangtan menyiapkan database dan system informasi kesesuaian jenis varietas dengan agroekosistem sehingga potensi hasil dari jagung yang ditanam dapat dicapai. Selain jagung, pengembangan sorgum juga menjadi sorotan Komisi IV.



Kunjungan ke Balai Besar Veteriner (BBVet), Maros

BBVet Maros menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI. Kunjungan kerja dalam masa reses tersebut dilaksanakan guna mengetahui dan meninjau langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BBVet Maros selaku bagian dari mitra kerja Komisi IV di lingkup Kementerian Pertanian RI. Rombongan yang dipimpin langsung oleh ketua Komisi IV Sudin, SE memulai kegiatan dengan meninjau laboratorium uji BBVet Maros. Hal ini dilakukan guna mengetahui apa saja kekurangan serta kebutuhan laboratorium sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan kinerja BBVet Maros serta diskusi guna memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi BBVet Maros. BBVet Maros sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI mempunyai tugas pokok melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner dengan wilayah kerja 10 Provinsi di Indonesia bagian tengah dan timur, antara lain: Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.



Kunjungan ke Pabrik Pupuk PT Pupuk Indonesia

Memasuki masa musim tanam, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk konsisten menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Ketersediaan pupuk bersubsidi memang harus dijaga bagaimanapun caranya. Selain itu, jika dalam pengawasan terjadi penyimpangan di lapangan maka pihak terkait diminta untuk segera melaporkan pada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KP3. Seluruh pihak diminta mampu bersinergi demi mendukung stabilitas di sektor pertanian. Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia (Persero), Aas Asikin Idat mengatakan memasuki masa musim tanam, pihaknya sudah menyiapkan stok nasional pupuk bersubsidi sebanyak 1,47 juta ton. Jumlah tersebut mencapai tiga kali lipat dari ketentuan dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan selama dua bulan ke depan atau hingga Februari 2020. Sepanjang 2019 Pupuk Indonesia tercatat telah menyalurkan sebanyak 8,13 juta ton pupuk bersubsidi. Penyaluran tersebut setara dengan 92 persen dari total alokasi pupuk bersubsidi pada 2019 yakni sebesar 8,8 juta ton. Hingga 16 Desember 2019, stok nasional pupuk subsidi sampai dengan lini IV atau tingkat pengecer mencapai 1,47 juta ton yang terdiri dari pupuk jenis Urea 696.393 ton, NPK 405.265 ton, SP-36 178.112 ton, ZA 122.448 ton, dan Pupuk Organik 68.916 ton.



Kunjungan ke Gudang Bulog, Divre Maros

Sebagai perusahaan umum milik negara yang di bidang logistik dan pangan, Bulog berperan penting dalam menyangga kebutuhan pokok (pangan) dari rakyat Indonesia. Untuk itu, manajemen stok pada Bulog perlu di perbaiki, agar tidak ada beras menumpuk hingga menjadi busuk dan merugikan Bulog. Guna mengatasi probelm penumpukan beras, Komisi IV DPR RI menyarankan Bulog untuk bekerjasama dengan Kementerian Sosial dalam program e-Warung untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Terkait pemasalahan yang kerap terjadi Bulog, baik itu terkait program-program maupun regulasi, Komisi IV DPR RI juga menyarankan Bulog menggelar rapat gabungan dengan Komisi IV DPR RI dan menghadirkan Kementerian Sosial membahas persoalan yang menjadi hambatan dalam merealisasikan program kerja.



Kantor Karantina di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jatim

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin mendukung upaya untuk melengkapi peralatan yang ada di Kantor Karantina Bandara Internasional Juanda Surabaya dalam rangka memproteksi wilayah Jawa Timur dari penyebaran virus melalui hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, penting agar kantor karantina dilengkapi oleh peralatan yang modern dan memadai. Karantina hewan burung dan ikan yang berada di Bandara Juanda sebagai filter awal dan akhir dalam memproteksi penyebaran virus di wilayah Jatim. Bagaimana mengatur lokasi barang bawaan seluruh penumpang baik domestik maupun internasional agar tidak membawa virus atau bagaimana barang bawaan yang bernyawa itu sehat, sehingga kantor karantina yang berada di bandara itu betul-betul menjadi kebutuhan. Perlu adanya renovasi dan diikuti dengan peralatan yang memadai.





Pasalnya hingga kini, Kantor Karantina yang ada di Bandara Juanda masih menumpang di Kantor Bea Cukai. Sehingga ke depan dirasa perlu ada penguatan. Usai melakukan peninjauan, Tim Kunker Komisi IV DPR RI melanjutkan diskusi terkait program kerja kekarantinaan di tahun mendatang. Setelah itu Komisi IV DPR RI juga turut melepas ekspor hasil usaha pertanian masyarakat Jawa Timur. Adapun hasil usaha rakyat ini dibeli oleh wirausaha dan diekspor ke beberapa negara, diantaranya kopi, sarang burung dan hasil perkebunan dan pertanian lain. Adapun nilai ekspornya mencapai Rp 198,06 miliar. Komisi IV DPR RI berharap Kementerian Pertanian turut serta sungguh-sungguh untuk terus memotivasi masyarakat, khususnya untuk memanfaatkan lahan milik negara yang tidur atau tidak untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dalam kesempatan ini, Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil menyampaikan, hingga pertengahan tahun 2019 seluruh produk pertanian yang diekspor melalui unit kerja Karantina Pertanian Surabaya telah diterima dengan baik oleh negara tujuan atau tidak ada penolakan. Ia juga menambahkan bahwa saat ini diperlukan penambahan SDM dan sarana prasarana untuk mendukung penyelenggaraan perkarantinaan yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.





Kunjungan ke Kabupaten Sampang, Jawa Timur

Komisi IV DPR RI mengajak seluruh kementerian dan lembaga di tingkat Pemerintah Pusat untuk membangun sinergi dengan Madura dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu masyarakat yang ada di sana. Harapannya tetap menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Pemerintah dan selalu sinergi untuk mendukung Madura terkait program yang bermitra di Komisi IV DPR RI, seperti pertanian, kehutanan, dan lingkungan.

Dalam kesempatan ini, Tim Kunker Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin turut memberikan bantuan untuk renovasi pasar, serta membawa 2 ribu bibit pertanian, 2 motor roda tiga untuk pengangkut sampah dan 1 unit mesin pencacah padi dan 1 unit mesin daur ulang sampah plastik kepada masyarakat Sampang. Komisi IV DPR RI berharap, bantuan yang diberikan dalam digunakan secara maksimal untuk peningkatan sarana pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian itu sendiri.

Untuk agenda ke depan, Komisi IV DPR RI akan terus membangun jaringan komunikasi dengan mitra-mitra di Komisi IV DPR RI untuk membuat program yang bermanfaat bagi masyarakat Madura. Hal itu senada dengan permintaan Bupati Sampang Slamet Junaidi yang meminta Komisi IV DPR RI menaruh perhatian terhadap sektor pertanian di Sampang. Terkhusus petani garam yang saat ini mengalami harga yang cukup anjlok. Turut serta dalam kunjungan ini sejumlah mitra kerja dari BUMN, seperti PT. SHS, PT. Pertani, PT. Berdikari, PT. Garam, Perum Perhutani, Holding PT. Pupuk Indonesia, Perum Bulog, dan Petambak Garam, serta Komunitas Petani Garam Madura.



Kunjungan ke Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin meyakini bahwa produktifitas pertanian di Jawa Timur akan semakin maju apabila didukung dengan sinkronisasi dengan seluruh instansi pusat dan daerah. Karena itu, Komisi IV DPR RI mendorong agar sinkronisasi itu dibangun dalam rangka kerja bersama untuk meningkatkan kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa melakukan sinkronisasi untuk membuat kebijakan bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kebijakan itu bisa diusung bersama-sama menggunakan APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi Jatim, dan APBN. Jatim cukup beruntung, karena secara geografis sangat mendukung untuk keberlangsungan sektor pertanian, masyarakatnya pun juga memiliki hobi bercocok tanam. Sehingga segi permodalan ini perlu mendapat dukungan Pemerintah. Misalnya sapi dari Bupati, kandang dari Pemprov, dan APBN dari Pemerintah Pusat akan melakukan pelatihan profesional, karena peternak biasanya masih tradisional, sehingga hasilnya tidak optimal.

Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyambut baik perhatian Komisi IV DPR RI terhadap pertanian di Jatim. Ia mengutarakan komitmennya untuk mengembangkan pertanian di Jatim. Karena diketahui sepertiga masyarakat Jatim bekerja sebagai petani, namun sektor pertanian menyumbang kurang dari seperenam dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga ini perlu dukungan pemerintah pusat dalam rangka mengembangkan sektor pertanian guna meningkatkan PDB.



CHAPTER 3

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

KOMISI IV DPR RI

BERSAMA

KEMENTERIAN PERTANIAN RI



Kunjungan ke Daops, Manggala Agni, Kota Jambi

Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV DPR RI terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga dilakukan di Provinsi Jambi. Direktur Jenderal Perkebunan, Kasdi Subagyo mendampingi Komisi IV DPR RI bersama Unsur Muspida Prov. Jambi, Badan Restorasi Gambut, Sekjen KLHK Kementerian LHK, dan unsur Satgas Karhutla Jambi. Komisi IV DPR RI berkunjung ke Markas Daerah Operasi (Daops) Manggala Agni Kota Jambi dan melakukan diskusi lapangan terkait sumberdaya pengendalian karhutla. Pengendalian karhutla menurut Komisi IV DPR RI menekankan pada upaya pencegahan. Komisi IV DPR RI kemudian memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya maksimal semua pihak yang telah melakukan upaya pengendalian karhutla.



Komisi IV DPR RI menekankan bahwa sosialisasi tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus terus digencarkan kepada seluruh elemen masyarakat, agar masyarakat tahu pembakaran hutan dan lahan itu tidak boleh dilakukan. Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, camat, bupati, dan perangkat lainnya harus terus mensosialisasikan ke desa-desa yang sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jika hanya mengandalkan Pemerintah pusat mustahil bisa berjalan dengan lancar. Undang-undang (UU) yang mengatur tentang karhutla belum terlalu tegas dan masih ada tumpang tindih tentang regulasinya. Tim kunspek Komisi VI DPR RI menginginkan agar nanti UU-nya segera dipertegas lagi, dan bisa memberi efek jera terhadap pelaku-pelaku pembakaran hutan.

Dalam waktu dekat, Komisi IV DPR RI akan mengundang seluruh Gubernur Bupati, Satgas Karhutla dan Dinas Kehutanan serta stakeholder terkait daerah yang sering terkena dampak karhutla, untuk menyatukan visi bagaimana pencegahan agar tidak terulang kembali kebakaran hutan yang mengganggu kesehatan dan kehidupan aktivitas masyarakat. Pada kesempatan yang sama Komandan Satgas Karhutala Kota Jambi yang juga Komandan Korem 042/Garuda Putih Elphis Rudy menambahkan bahwa dalam menangani kebakaran hutan ini, masih belum ada sinergitas antara pihak-pihak yang terkait dalam menangani karhutla. Ia berharap besar kepada seluruh elemen yang ada untuk bersinergi sehingga masalah karhutla bisa diatasi.



CHAPTER 4

KUNJUNGAN KERJA MENTERI PERTANIAN

BERSAMA

DPR / DPD / MPR RI



Kunjungan ke Depo Pelindo III, Tanjung Emas, Semarang

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo melepas ekspor komoditas Porang lewat Depo Pelindo III, Tanjung Emas, Semarang. Ditemani oleh Fadholi, Anggota Komisi IV DPR RI, Mentan melepas ekspor sebanyak 60 ton komoditas Porang dengan nilai senilai Rp 1,2 milyar menuju tiangkok. Ekspor ini menggenapkan jumlah eksportasi Porang dari Jawa tengah sebanyak 509 ton sejak awal Januari hingga pertengahan November 2019. Porang merupakan jenis tanaman umbi-umbian yang tergolong tanaman liar, namun sangat diminati di Negeri Tiangkok. Sedangkan di dalam negeri khususnya pulau Jawa tanaman tersebut tidak dimanfaatkan.



Kunjungan ke Instalasi Karantina Hewan, Salatiga, Jateng

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengunjungi Instalasi Karantina Hewan atau rumah prosesi sarang walet di kawasan Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (19/11). Dalam kunjungan ini, Mentan meninjau berbagai proses produksi walet hingga disiapkan menjadi produk ekspor. Setelah meninjau, strategi Kementan adalah meningkatkan ekspor yang ada menjadi 3 kali lipat. Tentu juga berharap selama 5 tahun ini akan bicara grafik atau gerakan ekspor dengan mempersiapkan hulu dan hilir untuk kesejahteraan. Kementan akan menyiapkan kelompok pengelola rumah walet sebagai pihak yang berperan di hulu. Selanjutnya menyiapkan pabrik sebagai kelompok yang berperan di hilir. Oleh karena itu Mentan berharap kepada seluruh jajaran di Kementerian Pertanian untuk terus mendorong SBW (sarang burung walet) sebagai komoditas penting dan dipersiapkan ekspor dengan kemasan yang sangat baik. Berdasarkan data sertifikasi ekspor perkarantinaan IQFAST, Karantina wilayah kerja Semarang mencatat adanya 47,4 ton SBW dengan nilai transaksi Rp17,6 milyar berhasil melapak di pasar ekspor mancanegara selama Januari hingga Oktober 2019. Sementara secara nasional, volume ekspor SBW menapai 640,7 ton atau senilai 2,2 triliun.





Kunjungan ke PT Ewindo, Purwakarta, Jawa Barat

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melepas ekspor benih sayuran Cap Panah Merah sebagai produk jual perusahaan East West Seed, di Purwakarta. Ekspor dengan tujuan berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika ini memiliki nilai transaksi sebesar Rp98 miliar. Ekspor ini menjadi bagian dari upaya negara yang didorong Bapak Presiden Jokowi agar bangsa Indonesia dihormati dan ditakuti oleh bangsa lain. Oleh karena itu, Mentan mendorong Ewindo tingkatkan ekspor menjadi tiga kali lipat. Mentan meminta upaya tersebut ditingkatkan menjadi tiga kali lipat ekspor sebagai dukungan dan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani yang dicanangkan pemerintah melalui kementerian pertanian. Melakukan ekspor itu adalah bagian dari derajat kebangsaan. Kalau impor itu artinya lemah. Boleh impor, tetapi harus lebih banyak ekspor. Menurut Mentan, sektor pertanian adalah solusi dari segala persoalan bangsa Indonesia karena berkaitan langsung dengan pemenuhan perut masyarakat Indonesia. Terlebih soal pembukaan lapangan kerja.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mendukung upaya Kementerian Pertanian dalam meningkatkan ekspor pertanian. Dukungan itu salah satunya dengan mengawasi semua kebijakan impor. Sementara itu, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyampaikan terima kasih atas kunjungan menteri pertanian di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dia berharap kunjungan ini bisa memompa semangat petani menguatkan ketahanan pangan yang dicanangkan.

Managing Director East West Seed, Glenn Pardede menjelaskan bahwa lalu lintas ekspor yang berjalan selama tahun 2019 ini sudah menembus negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Beberapa di antaranya masuk ke pasar India, Jepang, Hongkong, Sri Lanka, Bangladesh, dan Pakistan Totalnya Rp. 98 miliar dan juga sudah mencanangkan target di 2020 sebesar Rp 50 miliar. Selain itu, saat ini tengah mengembangkan produksi 150 varietas benih Hortikultura yang memiliki mitra dengan 17.000 petani. Menurutnya keberhasilan ini tak lepas dari dukungan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian atas berbagai kemudahan izin ekspor.



Kunjungan ke Desa Karang Baru, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyerukan para petani di Sumatera Selatan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus untuk menyukseskan Sumsel sebagai gerbang ekspor beras. Kementan mengururkan sekitar Rp. 30 miliar di Sumsel untuk bantuan di bidang pertanian, baik untuk benih, pupuk NPK, maupun traktor. Mentan ingin petani juga berorientasi untuk meningkatkan produktivitas beras dengan memperbarui peralatan teknologi pertanian. Jika petani masih menggunakan teknologi dan alat penggiling tradisional, banyak beras yang patah. Namun, dengan teknologi baru dan peralatan modern, hasil produksi beras akan semakin meningkat dan menjadikan kualitas beras lebih baik.

Mentan mengaku tak cepat puas jika bicara soal kinerja meskipun capaian target kinerja tahun ini sudah terlampaui. Namun, target hanya sebagai titik awal untuk mengukur karena masih ada banyak yang harus dilakukan agar lebih maksimal. Tahun ini ada kondisi El Nino sehingga kemarau panjang dan berdampak pada produktivitas sektor pertanian. Terkait tekad Sumsel menjadi gerbang ekspor beras, Mentan berharap komitmen itu bisa dijalankan dengan baik dan maksimal, yaitu dengan meningkatkan varietas, cara tanam, mekanisasi, dan pengetahuan petani. Menurut Mentan, Sumsel mempunyai lahan yang sangat bagus dan pemerintah akan semaksimal untuk menjadikan provinsi ini bagian yang menghidupkan Indonesia dalam kepentingan pangan.



Anggota Komisi IV DPR RI, Riezky Aprilia, SH MH, yang juga hadir mendorong agar Provinsi Sumsel dapat menjadi penyumbang untuk kedaulatan pangan secara nasional, karena selama ini Sumsel salah satu daerah sebagai lumbung pangan. Namun, untuk itu diakui Riezky tentu harus didukung dengan ketersediaan benih dan pupuk untuk mencapai kedaulatan pangan, karena selama ini petani banyak mengeluh akan ketersediaan pupuk dan benih. Ia mengaku, setiap persoalan yang dikeluhkan petani selama ini, menjadi bahan baginya kepada pemerintah melalui kementerian pertanian untuk dituntaskan.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan hasil produksi pangan di Sumsel sudah mendekati 6 juta ton beras per tahun. Sumsel sangat surplus. Pada tahun 2017, rangking 8, dan tahun 2019 rangking 5. Gubernur mengatakan, selain Banyuasin, daerah lainnya yang diutamakan menjadi sumber ekspor beras ialah Ogan Omering Ulu Timur. Hadir pula dalam kunjungan ini Anggota Komite II DPD RI dari Provinsi Sumatera Selatan, Amaliah Sobli, S.KG



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN

Gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA), Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan

Telp / Fax : (021) 7883485

www.pertanian.go.id

untuk update berita dan informasi sektor pertanian

follow us on :



kementerian pertanian RI



@kementan



@kementerianpertanian



kementerian pertanian RI